

인도네시아 투자진출 한국기업

세무 및 노무 세미나

BNG Consulting

목차

- 세션 1

- 인도네시아 부동산 가이드 (세금, 권리유형)
- 비상장 주식 매매와 관련한 절차, 세금
- 인도네시아 주식 거래와 관련한 세금
- 배당과 관련한 가이드 (절차, 세금)
- 재난 성금에 대한 손금 산입여부

- 세션 2

- **조세 감면 신청과 관련한 가이드**
- 외부회계 감사 대상 여부
- 사회보장제도 BPJS
- 외국인 체류 허가와 관련 내용
- 인도네시아 노동법 (9,10장 및 12장)

인도네시아 부동산 가이드

인도네시아 부동산과 관련한 세금

토지 및 건물 보유세 (PBB : Pajak Bumi dan Bangunan)

지방세로 지방정부가 매년 과세통지서(SPPT) 발급 .

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPENJARAN
A.0796837

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

NOP: 31 21 040 002 018-0141 0 #109041B1235574URT4N5713/02H

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
JL PRAPANCA RAYA APT KINTAMANI A/8/1 RT: 000 RW: 00 PELA MAMPANG MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN		BNG CONSULTING PT JL PRAPANCA RAYA APT KINTAMANI A/8/1 RT: 000 RW: 00 PELA MAMPANG JAKARTA SELATAN	

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	0	035	0	0
BANGUNAN	136	035	4.200.000	571.200.000
BUMI BERSAMA	54	105	10.545.000	1.055.430.000
BANG BERSAMA	91	035	4.200.000	382.200.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2	2.008.830.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	0
NJOP untuk penghilangan PBB-P2	2.008.830.000
PBB-P2 yang Terutang	4.017.660

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 4.017.660
EMPAT JUTA TUJUH BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RUPIAH

TGL JATUH TEMPO 14 SEP 2018
TEMPAT PEMBAYARAN:
BANK DKI BRI, BRI SYARIAH,
BCA, MANDIRI, BNI, BIL, CIMB NIAGA,
BANK BUKIT BARIS, PT. POS, PT. TELKOM

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH
KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERALIHAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KABUPATEN KEPENJARAN
MULIAH HIDAYAT, SE, MSi
281756031906

Peraturan Pemerintah No. 25 /2002

Pasal 1.

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% (empatpuluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak;
- b. objek pajak lainnya :
 - 1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
 - 2) sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

A.0796837

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

NOP: 31 71 040 002 018-0141 0

#109041B1235574URT4N5713/02#

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
JL PRAPANCA RAYA APT KINTAMANI A/8/1 RT: 000 RW: 00 PELA KAMPANG KAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN	BNG CONSULTING PT JL PRAPANCA RAYA APT KINTAMANI A/8/1 RT: 000 RW: 00 PELA KAMPANG JAKARTA SELATAN

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	0		0	0
BANGUNAN	136	035	4.200.000	571.200.000
BUMI BERSAMA	54	105	17.545.000	1.055.430.000
BANG BERSAMA	91	035	4.200.000	382.200.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2	2.008.830.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	0
NJOP untuk penghilangan PBB-P2	2.008.830.000
PBB-P2 yang Terutang	4.017.660

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 4.017.660
EMPAT JUTA TUJUH BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RUPIAH

TGL JATUH TEMPO 14 SEP 2018
TEMPAT PEMBAYARAN:
BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH,
BCA, MANDIRI, BNI, BII, CIMB NIAGA,
BANK BUKITA, DAN BANGKALAN RT BOS RTI
SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH
KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN



TOTAL NJOP : 2.008,830,000

PBB : $(40\% \times 0.5\% = 0.2\%) \times \text{NJOP}$

4,017,660

토지, 건물 취득과 관련된 세금 (BPHTB)

- Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

토지 및 건물 권리 이전에 과한 세금

- 지방세로 공시지가와 매매금액의 높은 금액에서 지역별 공제금액을 공제 한 과표에서 최고 5%

JAWA BARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD - BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPBP PBB)		011189 Lembar 1 Untuk Wajib Pajak	
KANTOR DINAS / SUKUDINAS / UNIT PELAYANAN PAJAK :					
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.					
A. 1. Nama Wajib Pajak : P T D A E S H I N G L O B A L P E R D A N A					
2. NPWP : 8309840001-014000					
3. Alamat Wajib Pajak : Menara Jamsostek Jl G Subroto Blok/Kav/Nomor : 38					
4. Kelurahan/Desa : Kuningan Barat 5.RT/RW : Kecamatan : Mampang Prapatan					
7. Kota / Kabupaten : Jakarta Selatan 8. Kode Pos :					
B. 1. NOP PBB : 217100000201200240					
2. Lokasi Objek Pajak : Jl Gatot Subroto Jend Blok/Kav/Nomor : 25/01					
3. Kelurahan : Kuningan Timur 4. RT/RW :					
5. Kecamatan : Setiabudi Kode Pos :					
Penghitungan NJOP PBB :					
Uraian		Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun)	
Tanah (bumi)		7	20 m ²	9	Rp 64.000.000,-
Bangunan		8	157 m ²	10	Rp 4.825.000,-
				11	Rp 1.280.000.000,-
				12	Rp 757.525.000,-
				13	Rp 2.037.525.000,-
				14	Rp 2.200.000.000,-
Jual Beli NJOP PBB :					
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : 01 14. Harga transaksi / Nilai pasar : Rp 2.200.000.000,-					
16. Nomor Sertifikat : BMBKR No. 221/42/Kelurahan Kuningan Timur					
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)					
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14					
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)					
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang					
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar					
D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)					
a. Penghitungan Wajib Pajak					
b. STPD / SKPKB / SKPKBT *) Nomor : Tanggal :					
c. Pengurangan dihitung sendiri karena :					
*) Coret yang tidak perlu					
Nama VWP : P T D A E S H I N G L O B A L P E R D A N A					
Nama VWP : MENARA JAMSOSTEK 38 SUBROTO 38 KUNINGAN					
Jumlah yang disetor (dalam Rupiah) : 106.000.000,-					
Denda : 317105000201500545					
Jenis Pajak : 8111					
Tanggal dan Jam Trx : 12/12/2017 11:17:11					
Cabang : 00508					
Jumlah Tagihan : Rp. 105.000.000,-					
Bayar : Rp. 10.000,-					
Total Bayar : Rp. 105.010.000,-					
MENGETAHUI : PEJABAT LELANGRA KANTOR					
DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB					
TELAH DIVERIFIKASI : DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA					
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan					
Nomor Dokumen :					
NOP PBB baru :					

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang faktanya diperoleh)		NJOP PBB / m ² (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun.....)		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7	20 m ²	9	Rp 64.000.000,-	11	Rp 1.280.000.000,- angka 7 x angka 9
Bangunan	8	157 m ²	10	Rp 4.825.000,-	12	Rp 757.525.000,- angka 8 x angka 10
Jual Beli NJOP PBB:					13	Rp 2.037.525.000,- angka 11 x angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: 01					14. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp 2.200.000.000,-	

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14	<input checked="" type="checkbox"/>		1	Rp. 2.200.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Rp. 60.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<input checked="" type="checkbox"/>	angka 1 - angka 2	3	Rp. 2.120.000.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	<input checked="" type="checkbox"/>	5% x angka 3	4	Rp. 106.000.000
Pengenaan 50% karena waris / hibah/wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	<input checked="" type="checkbox"/>	50% x angka 4	5	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6	Rp. 106.000.000

토지와 건물 이전 관련 세금 (PPh4(2))

- 매도자에게 매매금액의 2.5%를 과세하며, 최종분리과세임
- 2016년 8월 8일 정부령 No.34/2016 공포, 2016년 9월 7일부터 5%에서 2.5% 변경
- 정부토지 목적 또는 공익 건물 등을 수용할 경우에는 0%
- 토지/건물 이전을 사업으로 하는 부가세 면제를 받는 소형국민 주택 혹은 소형 아파트 거래시 1%

특별소비세 (PPn BM)

- 2015년 11월 20일자로 변경 / 2017년 개정
- 세율은 20%로 종전과 동일
- 층별소유권 비구분(Non strata title) 종류로부터의 주택 및 타운 하우스 건축면적 350m² 또는 이상 ➔ 200억 루피아 이상
- 층별 소유권 구분(Strata title) 종류로부터의 아파트,콘도미니엄, 타운하우스 건축면적 150m² 또는 이상 ➔ 100억 루피아 이상

재무부장관령 86호 (No.86/PMK.010/2019)

- No. 35/PMK.010 /2017

층별소유권 비구분(Non strata title) 종류로부터의 주택 및 타운 하우스 200억 루피아 이상 / 층별 소유권 구분(Strata title) 종류로부터의 아파트,콘도미니엄,타운하우스 100억 루피아 이상

➔ 300억 루피아 이상 20% PPn BM (No.86/PMK.010/2019)

2019년 6월 11일 발효

토지와 건물 임대 관련 세금 (PPh4(2))

- 임차인은 임차료의 10%를 원천징수하여 익월 10일 납부, 20일 신고
- 임대인은 임대 수익의 경우 PPh4(2) 로 bukti potongan PPh4(2)를 임차인에게 전달받아 연간신고(SPT tahunan)시 신고

토지와 관련한 권리 유형

소유권 (Hak Milik)

- 토지 및 건물에 대한 소유권으로 인도네시아 국적의 개인 또는 공기업에만 허용되는 최상위에 권리임.
- 인도네시아 국민이 국적을 포기할 경우 1년 이내에 토지를 양도하지 않으면 국가에 귀속됨

건축권 (Hak Guna Bangunan)

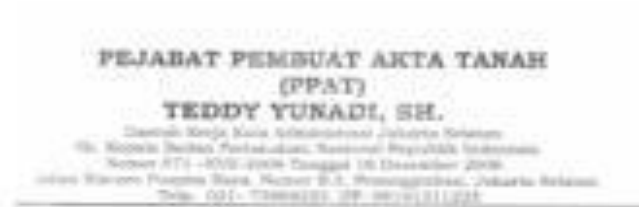
- 건축물에 대한 지상권으로 인도네시아 국적의 개인 또는 법인, 외국인 투자법인에게 허용되는 권리로 해당 토지 지상에 건축물을 건축하여 소유할 수 있으며, 담보로 설정할 수 있고, 매매, 교환, 현물출자, 증여, 상속의 대상이 됨.
- HGB 가 국유토지위에 설정되는 경우 최초 30년 이후 20년 연장 가능. 연장 종료 이후 30년 갱신 가능하며 Hak Milik 위에 설정되는 경우에는 최초 30년, 연장 불가하며 갱신 30년 가능
- 연장시 기준금액을 적용하여
200m² 이하: 0% / 200~ 600 m² 1% / 600~2,000m² 2% / 이상 3%
(기준금액은 NJOP 를 적용하지 않고, 최초 허가시 기준금액 적용)

사용권 (Hak Pakai)

- 국가 또는 타인 소유 토지에 대한 사용권으로써 인도네시아 국적의 개인, 법인 및 인니 거주 외국인도 취득 가능
- Haka Pakai 가 국유토지 위에 설정된 경우 최초 30년 최대 20년 연장가능하며, Hak Milik 위에 설정된 경우에는 최대 25년이며, 25년 갱신이 가능함
- 연장시 기준금액에 50%~60%

경작권 (Hak Guna Usaha)

- 인도네시아 국적의 개인 또는 법인, 외국인 투자법인에게 허용됨
- 토지를 농업, 재배업등의 목적으로 사용할 수 있는 권리로 최소 5Ha 이상의 면적이어야 하며 국유토지로 제한됨.
- 권리 기간은 25년이지만 필요에 따라 최대 35년까지 보유 가능하며 25년 연장 가능함.



AJB

(PPAT)

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

The image shows a detailed form for 'SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (BPHTB)'. It includes various fields for taxpayer information, property details, and tax calculations. There are several stamps and signatures on the form, indicating it has been processed and approved. The form is titled 'SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (BPHTB)' at the top.

Surat Setoran Pajak Daerah
(BPHTB)



Sertipikat

비상장주식 매각과 관련한 절차와 세금

매각

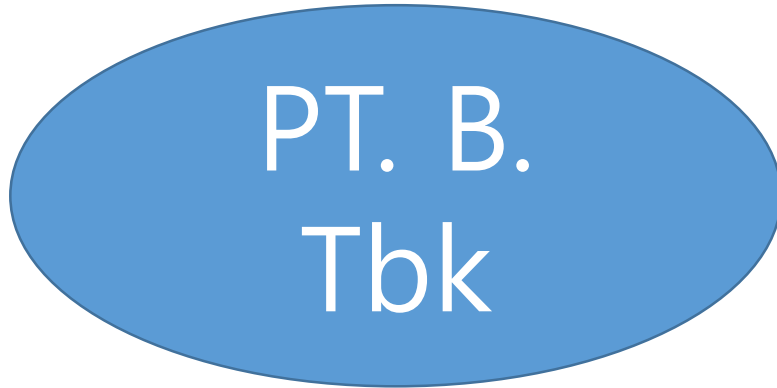
- 자산 매각
- 지분 매각

비상장 주식의 지분 매각

- 한국 투자자(비거주자)가 인도네시아의 비상장 주식을 인수할 경우 또는 투자자간 지분 변경시에 매도인이 비거주자라면 법인에서 매매금액의 5%를 원천징수하여 납부하여야 한다 (PPh26)
- 한국과 인니 조세협약의 경우 양도소득세는 한국에서 과세한다고 규정되어 있지만, 매도자는 한국의 관할세무서에서 Form DGT (또는 COR) 를 거래일 이전일자로 받아 제출을 하여야 조세협약이 적용될 수 있겠다

주식거래에 관한 인니 세법 규정

주주 : A (인도네시아 비거주)



주주 : A (인도네시아 거주)

A의 거주국이 인도네시아, B가 상장사인 경우

- A가 보유한 B업체 주식을 C에 매각시에는 주식가치의 0.1% (단 기업 공개 시점의 경우 주식가치의 0.5%) 를 원천징수(PPh 4(2))하며 처분 이익은 최종분리과세(Final Tax) 됨.
- 관련법령 - 대통령령(PP131/139) 및 재무부장관령 (No.282 /KMK 04/1998) 증권거래소에서 매매되는 주식 증권거래에 대한 소득 조항

A의 거주국이 인도네시아, B가 비상장인 경우

- 별도의 원천세는 없으며 처분이익은 익금 산입됨. A가 12월 결산법인의 경우 익월 4월말일까지 법인세 신고시 합산하여 신고하며, A가 개인(인니거주자)인 경우 익월 3월말까지 개인소득세 신고시 합산하여 신고
- 관련법령 - 소득세법(UU No,36 / 2008) 4조 1항 D – 자산의 매매이익 및 양도 조항

A의 거주국이 한국, B가 상장인 경우

- 1항과 동일하게 주식가치의 0.1% (기업공개 시점의 경우 0.5%)
를 원천징수하며 처분이익은 최종분리과세임
- 관련법령 - 대통령령(PP131/139) 및 재무부장관령 (No.282 /KMK 04/1998) 증권거래소에서 매매되는 주식 증권거래에 대한 소득 조항

A의 거주국이 한국, B가 비상장인 경우

- Form DGT 작성시 한국에서 과세
관련법령 - 한,인니 조세협약 P3B 1988 - 13조 양도소득
- PPh26 조항을 적용할 경우 주식 매매 금액의 5%를 B가 원천징수하여 익월 10일 납부, 20일 신고
- 재무부장관령(KMK No434/KMK-04/1999) 2조 2항에 조세협약 P3B 가 체결된 국가의 경우 P3B 가 우선한다는 전제 규정이 있음

- 알기 쉬운 인도네시아 세법 2018년 판
Page 79 ~ Page 81 는 2019년 1월1일 변경됨



2017년 8월 1일부터 양식 변경(PER-10/PJ/2017) (2018년판)

2019년 1월 1일부터 Form DGT 1, 2 통합된 서식으로 변경
국세청장령 25호 (PER-25/PJ/2019)



**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

Guidance :

1. This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has been concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia
2. For person who is:
 - a banking institution, or
 - a pension fund, or**Complete only DGT Page 1**
3. For Individual, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2**
4. For non-Individual other than mentioned in Number 2, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2**

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

Part I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : _____ (1)

Name : _____ (2)

Full address : _____ (3)

Country : _____ (3)

Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

**Part II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE
OF THE COUNTRY OF RESIDENCE**

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (7) for the period _____ (8) to _____ (8) within _____ (9) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (12)



_____, _____ (13) _____ (14) _____ / _____ / _____ (15)
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office Capacity/designation of signatory Place, date (mm/dd/yy)

Office address : _____ (16)

Part III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)

I declared that:

- 1 This company is not an Indonesian resident taxpayer;
- 2 This company is a resident of _____ (17) for income tax purposes within the meaning; of DTC of both countries
- 3 the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;
- 4 in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;
- 5 the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and
- 6 I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.

_____, _____ (18) _____ (19) _____ (20)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

Part IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

1. Place and Date of Birth (mm/dd/yyyy) : _____ / _____ / _____ (21)
2. The purpose of the transactions is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC ☐ Yes ☐ No (22)
3. Are you acting as an agent or a nominee? ☐ Yes ☐ No (23)
4. Do you have permanent home in Indonesia ☐ Yes ☐ No (24)
5. In what country do your ordinarily reside? _____ (25)
6. Have you ever been resided in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (26)
If so, in what period? _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
Please provide the address : _____
7. Do you have any office, or other place of business in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (27)
If so, please provide the address : _____

Part V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

1. Country of registration/incorporation : _____ (28)
2. Which country does the place of management or control reside? _____ (29)
3. Address of Head Office : _____ (30)
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : _____ (31)
5. The entity has relevant economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (32)
6. The entity has the same legal form and economic substance either in the entity's establishment or the execution of its transaction. ☐ Yes ☐ No (33)
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. ☐ Yes ☐ No (34)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (35)
9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business. ☐ Yes ☐ No (36)
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (37)
11. The purpose of the transaction is to directly or indirectly obtain the benefit under the convention that is contrary to the object and purpose of the DTC ☐ Yes ☐ No (38)

**Part VI TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL AND THE INCOME
EARNED IS/ARE DIVIDEND, INTEREST, AND/OR ROYALTY**

1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit ☐ Yes ☐ No (39)
2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income ☐ Yes ☐ No (40)
3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. ☐ Yes ☐ No (41)
4. The Entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability ☐ Yes ☐ No (42)
5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third party ☐ Yes ☐ No (43)

Part VII DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is

true, correct, and complete. I further declared that ☐

I am not an Indonesia resident taxpayer, will not be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in part II. (44)



This company is not an Indonesian resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I. (45)

Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient

_____, _____ / _____ / _____
Place, date (mm/dd/yy)

Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

배당과 관련한 가이드

배당과 관련한 규정

- 인도네시아 주식회사 법 (UU No.40 /2007) 제 70조
 - 1) 회사는 매년 당기순이익을 근원으로 준비금을 적립하여야 한다.
 - 2) 상기 1항의 준비금 적립 의무는 회사가 이익잉여금을 보유할 경우에 적용된다.
 - 3) 자본금의 20%가 될 때까지 적립 의무가 있다.
- 인도네시아 주식회사 법 (UU No.40 /2007) 제 71조
주주총회의 결정 사항

배당과 관련한 세금

Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPH Pasal 23

- 15% (berNPWP)
- 30% (tidak berNPWP)

Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPH Pasal 4(2)

- 10%

Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPH Pasal 26

- 20% atau tarif tax treaty

PAJAK ATAS DIVIDEN

WPOP dalam
Negeri

10% dan final

WP Badan
Dalam Negeri

15% - NPWP

30% - non
NPWP

WP Luar
Negeri

20% - tanpa
tax treaty

bervariasi –
sesuai tax
treaty

배당 관련 한 인니 조세협약

제 10 조

2항 가) 수익적 소유자가 배당을 지급하는 법인의 자본금의 최소한 25%를 직접 소유하는 법인(조합은 제외)의 경우에는 총 배당액의 10%

2항 나) 기타의 경우에는 총 배당액의 15%

재난 성금에 대한 손금 산입 여부

소득세법(UU No.36/2008) 제 6조 (1)항 기부금 손금 산입 규정

- 국가가 정한 국가 재난을 극복하기 위한 기부금
- 국가가 정한 인도네시아 내에서 행해지는 연구 개발을 위한 기부금
- 국가가 정한 사회 기반 시설 구축 비용
- 국가가 정한 교육 시설을 위한 기부금
- 국가가 정한 체육 기금을 위한 기부금

국가가 정한 국가 재난을 극복하기 위한 기부금이란

- 납세자는 국가 재해 피해자에게 기부하는 것과 관련하여 재난 관리 기관을 통해 직접 제출하거나 재난 구호 기금을 모금하기 위해 허가 된 기관을 통해 직/간접적으로 전달해야 한다.
- "국가 재해"가 의미하는 것은 자연적 요인 및 / 또는 비 자연적 요인 및 인명 피해를 초래하는 인적 요인으로 인해 생겨난 사람들의 삶과 생계를 위협하고 중단시키는 일련의 사건 또는 일련의 사건으로 환경 피해, 재산 손실, 심리적 영향 등이 포함된다.
- "재난 관리 기관"의 의미는 재난 관리와 관련하여 2007 년 법률 번호 24 (UU No24/2007)에 언급 된 국가 재해 관련 기부금을 수용, 배포 및 / 또는 관리하도록 정부가 결정한 기관이다.

기부금의 손금산입 조건 :

- 납세자는 직전년도 법인세를 근거로 순이익이 있어야 하고 기부금을 손금 처리하여도 결손이 되지 않아야 한다.

(예를들어 2017년도에 PT. A 기업의 순이익은 10억루피아였고, 2018년에 정부가 지정한 기관에 기부금을 40,000,000 루피아하였고 2018년 순이익이 30,000,000루피아였다면 10,000,000 루피아에 대해서는 손금불산입하여야 한다.)

- 유효한 증빙 자료

손금산입 한도

- 세무조정후 순이익에서 최대 5% (사회기반 시설 구축과 관련하여서는 추가 한도 설정됨)


- 사례 예 :

2017년 납세자의 순이익은 60억루피아일 경우 2018년 기부금
손금 최대 금액은 5 % 또는 3억루피아인데, 2018년 납세자는 5
억루피를 **사회시설 구축비로 기부**했을 경우 차액 2억루피아는 손
금불산입하여야 한다

조세 감면 신청과 관련한 가이드

선납법인세 및 부가세 면제 승인

• Surat Keterangan Bebas (SKB)

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 IMPOR
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Menerangkan bahwa orang pribadi/badan¹⁾ tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal²⁾

.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
(.....)
NIP.

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 23
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : KET-00017/POTPUT-PP46/WPJ.20/KP.0803/2017
TANGGAL : 02 Februari 2017

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
Menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : PT. G
NPWP : 02.2
Alamat : JL.S

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

JAKARTA, 02 Februari 2017
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pasar Rebo
KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
JAKARTA
PASAR REBO
Bambang Mudianto, S.E., M.M.
NIP. 195301051995031001

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:	a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama : PT. ABC
NPWP : 01.234.567.8-009.000
Nilai Transaksi : Rp. 123.000
Jenis Transaksi : Penghasilan atas jasa

.....
Sri Hardini
NIP. NIP. 19720303

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi

NOMOR : 451 /LSKB/WPJ.20/KP.08/2017
TANGGAL : 27-04-2017

PPh22

- 면제 조건

- 납세자가 신규법인 또는 투자 진행중인 법인, 이월 결손금, 자본재 수입 등

- 제출서류

- 신청서, 직전년도 법인세 신고서, 당해년도 추정손익계산서, 추정법인세 계산내역, 수입서류 (PIB, Invoice, Packing List, B/L 등), Master List (있는경우) 등

PPh23

- 면제 조건

- 년매출액 48억루피아 이하, 이월 결손금 등

제출서류

- 신청서, 직전년도 법인세 신고서, 당해년도 추정손익계산서,
추정법인세 계산내역 등

PPh25

- 납세자가 3 개월 이상 경과 한 경우, 납세자는 해당 과세 연도에 납부 할 소득세가 소득세 액을 산정하기위한 기초가되는 소득세의 75 % (75 %) 미만임을 입증
- 제 25 조 납세자는 납세자가 등록 된 세무서 장에게 서면으로 소득세 제 25 조 금액을 감축한다는 서면 요청서를 제출할 수있다. (KEP-537/PJ/2000 7조)
- 구비서류

신청서 / 직전년도 법인세 신고서 / 당해년도 추정손익계산서 /
당해년도 신청시까지 손익계산서 등



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 100/PJ/2015/00001/2015

TENTANG
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN PAJAK 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan surat Nomor: 100/PJ/2015/00001/2015, Wajib Pajak mengajukan Permohonan pengurangan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan dalam tahun pajak 2015
b. Bahwa setelah diteliti alasan-alasan yang diajukan, ternyata permohonan Wajib Pajak Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000
c. Bahwa untuk itu perlu dikehendaki Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Mengingat : 1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ/2000;
- Menetapkan :
PERTAMA : Mengabulkan untuk sebagian permohonan Wajib Pajak
- Nama Wajib Pajak : PT. [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
N P W P : [REDACTED]
- KEDUA : Menetapkan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari yang semula sebesar [REDACTED] menjadi [REDACTED] setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 masa September s/d Desember tahun 2015. Angsuran ini harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan, setelah akhir masa pajak. Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Tembusan disampaikan kepada:
Kepala KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

Tanggal Terima : [REDACTED]

[REDACTED]



법인세 중간 예납 PPh25 감면 결정서

PPN Impor

- 조건

- 수입자본재

- 구비서류

신청서 / Master List dari BKPM / 수입서류 (Draft PIB,invoice, Packing list, BL 등)/ 생산 공정도 / 수입자본재 사진,브로셔 등

외부회계 감사 대상 여부

외부회계 감사 대상 여부

- 인도네시아 주식회사법 68조
- 산업통산부장관령 121호

인도네시아 주식회사법 (UU No.40 /2007)

- 사회 다수인의 자금을 모금 혹은 관리하는 회사
- 일반에게 회사 채권을 발행하는 회사
- 상장된 회사
- 국영 기업체
- 보유 자산 및/혹은 매출이 500억 Rupiah 이상인 회사
- 법규로 지정된 회사

산업부장관 규정 121호

KMPP No.121/MPP/Kep/2/2002 2조

- 상장 기업
- 국영 기업
- 회사 채권을 발행한 회사자산 규모가 250억 루피아 이상
- 은행으로부터 감사보고서를 제출하여야 하는 채무자

사회보장제도 (BPJS)

BPJS 사회보장관리공단 (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

- BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) : 근로 BPJS
- BPJS Kesehatan : 건강 BPJS

BPJS ketenagakerjaan 요율

1. Jaminan Kecelakaan(JKK) 산재

사업주 0,24%~1,74%

2. Jaminan Kematian(JKM) 사망

사업주 0,3%

3. Jaminan Hari Tua(JHT) 노령

사업주 3,7% / 근로자 2%

4. Jaminan Pensiun(JP) 퇴직 Max Rp 8.512.400

사업주 2% /근로자 1%

Jaminan Hari Tua (JHT)

- 일시불 수령 자격

(원금 + 운용수익)

- 56세가 될 때
- 사망시
- 전신장애를 입었을 때
- 인도네시아를 영구히 떠날 때

- 부분 수령 자격

56세에 미달하지만 10년 이상
가입한 경우

- 퇴직대비용도로 적립액의 10%
수령 가능
- 주택구입용으로 30% 수령 가능

Jaminan Pensiun (JP)

- 매월 수령
 - 퇴직연금 : 정년도래 및 최소 180개월 납부
 - 장애연금 : 전신 장애
 - 자녀연금 : 본인 사망 및 배우자 부재시 => 50%
 - 배우자연금 : 본인 사망시 => 50%
 - 부모연금 : 본인사망 및 배우자,자녀 없는 경우 => 20%
- 한도 : 최소 300,000루피아 ~ 최대 3,600,000루피아
- 일시금 수령 : 가입 15년전 정년 도래, 가입 1년 미만 사망, 인니 영구히 떠날때

BPJS Kesehatan 요율

- Max Rp 8.000.000

사업주 4% / 근로자 1%

인도네시아 외국인력 사용관련 규정 변경 시행 (대통령령 제 20호)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 20
TAHUN 2018.

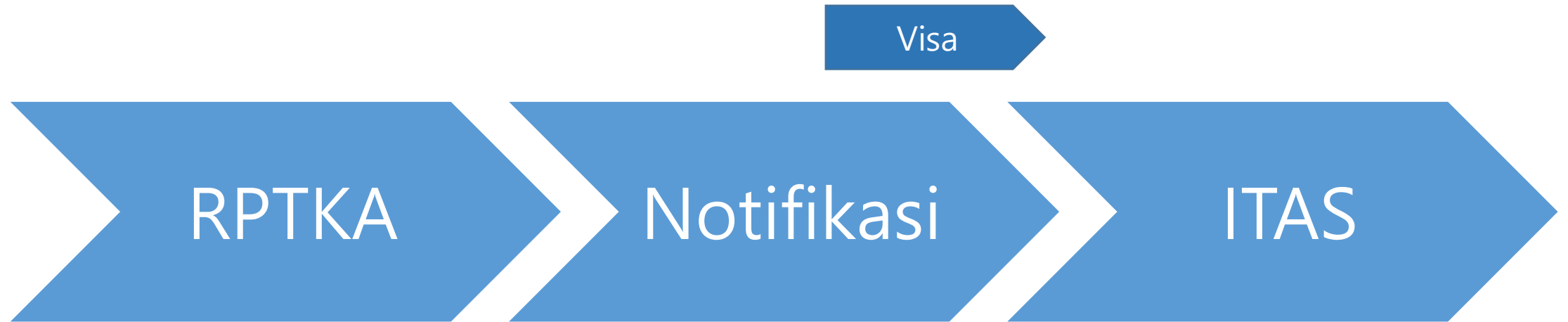
2018년 3월 26일 제정
발효는 제정된 날로부터 3개월 후

외국 인력 사용관련 노동부 장관령 10호 Permenaker No. 10 /2018

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

2018년 7월 11일 재정

ITAS 진행 절차



근로계약기간에 준함.
계약기간이 1년인 경우 EPO후
RPTKA 신청

IMTA 폐지
Notifikasi 발급으로부터 24시간
이내 DPKK \$1,200 납부

신규근로자 입국시 공항에서 사진촬영 및
지문날인 후 이메일로 ITAS 발송
연장 및 동반가족은 이민국에서 진행



KEMNAKER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, Lantai I Blok B, Telp.5255733,527585 Ext.287

NOTIFIKASI PERINTAH PEMBAYARAN**Baru****I. Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing:**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. No. Telepon : 021
4. Email :

II. Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan :

1. Nama TKA :
2. Tempat / Tgl Lahir :
3. Nomor Paspor : MS
4. Kewarganegaraan : KOREA SELATAN
5. Jabatan :
6. Tempat Pengambilan Visa : S
7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi :
8. Lokasi Kerja : Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota)
9. Jangka Waktu Notifikasi : **12 (DUABELAS) bulan**

III. Keputusan

1. Permohonan pengajuan penggunaan TKA yang diajukan pemberi kerja dapat disetujui dan selanjutnya pemberi kerja agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TKA akan dikirim ke Ditjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Notifikasi penggunaan TKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPTKA dapat diambil di loket pelayanan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKP-TKA

1. Tanggal : April 2019
2. Kode Pembayaran DKP-TKA :
3. DKP-TKA yang dibayarkan : **US\$ 1,200 (SERIBU DUA RATUS DOLAR AMERIKA)**
4. Pembayaran DKPTKA dilakukan di Bank Persepsi(bank BNI, atau Bank Mandiri, atau Bank BRI) dengan menunjukan kode pembayaran DKPTKA diatas.
5. Batas waktu pembayaran berlaku 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan Notifikasi Perintah Pembayaran. Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan data TKA akan terhapus secara otomatis.

V. Peringatan


1. Sebelum pembayaran DKPTKA, Pastikan bahwan TKA yang Saudara unggah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab pemberi kerja TKA.




Notifikasi 발행 후 1일 이내에 근로부담금 (DPKK) 납부하여야 함.

투자자 끼따스

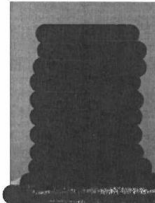
- 10억루피아 이상 투자자(주주)
이면서 이사 또는 감사인 경우
→ RPTKA 면제, DPKK 면제
- Occupation : INVESTOR
- Status : PENANAM MODAL




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANIM KELAS I KHUSUS
NON TPI JAKARTA SELATAN
JL. WARUNG BUNCIT RAYA
NO 207 JAKARTA SELATAN



IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK
ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT



NIORA	:	IM2	
Permit Number	:	2C21	
Stay/Multiple Entries Permit Expiry	:	25-06-2020	
Stay Permit Index	:	II B	



Full Name	:	
Place / Date of Birth	:	SEOUL / 19-0
Passport Number	:	MI
Passport Expiry	:	31-1
Nationality	:	KOREA SELATAN
Gender	:	MALE
Address	:	
Occupation	:	INVESTOR
Status	:	PENANAM MODAL

DISCLAIMER :

1. According to Article 71 Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, every changes of civil status, citizenship, occupation, Guarantor, or change of address must be reported to Local Immigration Office in an immediate period of time.
2. This Limited Stay Permit (online) must be attach to the bearer's Passport at all times
3. For further information please do not hesitate to contact Local Immigration Office or do visit our website www.imigrasi.go.id.

Jakarta, 24-05-2019

Head of Kanim Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan Immigration Office.

- 투자자 KITAS 신규 - 10억 루피아 이상인 주주만 신청 가능

1. Rekomendasi Visa BKPM 투자청 추천서 신청 및 발급

2. Telex 신청 및 발급

3. 공항 입국시 사진 촬영 및 지문 스캔하고 KITAS 발급

- 투자자 KITAS 연장 - 기존 일반 KITAS를 발급받았었지만, 주주 (10억 미만 지분 소유한 주주도 해당)라서 투자자 KITAS로 변경 후 연장하는 경우

1. Alih Status (일반에서 투자자로 status 변경)

2. Cek Lapangan (거주지 방문)

3. 이민국 사진 촬영 및 지문 스캔하고 KITAS 발급

일반 끼따스

주주가 아닌 경영자

- Occupation : DIREKTUR
- Status : WORK



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANIM KELAS I KHUSUS
NON TPI JAKARTA SELATAN
JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO 207



IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT



NIORA : J [REDACTED]
Permit Number : 20 [REDACTED]
Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 10-05-2020
Stay Permit Index : I B



Full Name : [REDACTED]
Place / Date of Birth : SEOUL / 10 [REDACTED]
Passport Number : M [REDACTED]
Passport Expiry : 10-0 [REDACTED]
Nationality : KOREA SELATAN
Gender : MALE
Address : [REDACTED]
Occupation : DIREKTUR
Status : WORK

DISCLAIMER :

1. According to Article 71 Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, every changes of civil status, citizenship, occupation, Guarantor, or change of address must be reported to Local Immigration Office in an immediate period of time.
2. This Limited Stay Permit (online) must be attach to the bearer's Passport at all times
3. For further information please do not hesitate to contact Local Immigration Office or do visit our website www.imigrasi.go.id.

Jakarta, 10-05-2019

Head of Kanim Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan Immigration Office.

감사합니다 😊
Q&A

김재훈

kimjhoon@bngconsulting.co.kr

